

**ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN
ANGGARAN PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2022-2024
DITINJAU DARI PERSPEKTIF AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK**

**Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Mencapai Derajat
Sarjana S1
Program Studi Akuntansi**



Disusun oleh:

**Ummi Rahmawati
NIM. 31402300187**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI 2025**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ANGGARAN PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2022-2024 DITINJAU DARI PERSPEKTIF AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Disusun Oleh :

Ummi Rahmawati

NIM : 31402300187

Telah di setujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 21 November 2025

Pembimbing

Hani Werdi Apriyanti, S.E., M.Si., Ak., CA

NIK 211414026

\Skrripsi ini telah di terima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Tanggal 21 November 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi S1 Akuntansi



Provita Wijayanti., S.E., M.Si., Ak., CA., IFP., AWP.

NIK : 211403012

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ummi Rahmawati

NIM : 31402300187

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :

**“ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ANGGARAN
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2022-2024 DITINJAU DARI PERSPEKTIF
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK”**

Adalah hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiat atau mengambil alih atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiarisme saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang , 21 November 2025



Ummi Rahmawati

ABSTRACT

This study examines the efficiency and effectiveness of budget implementation at the Library and Archives Office of Demak Regency for the fiscal years 2022–2024 through the lens of public sector accounting. The research focuses on evaluating the extent to which budget allocation, utilization, and program achievements align with the principles of value for money, which include economy, efficiency, and effectiveness in public financial management. Employing a descriptive–quantitative approach supported by secondary data from budget realization reports, program performance documents, and institutional planning materials, this study measures efficiency by comparing realized expenditures with outputs produced across key program areas, while effectiveness is assessed based on the achievement of performance indicators related to library development, archival management, and literacy enhancement initiatives. The findings reveal fluctuations in efficiency levels and target achievement during the three-year period, influenced by factors such as planning accuracy, administrative capacity, resource availability, and changes in policy priorities. Despite generally positive trends in budget absorption, several programs demonstrate gaps between planned outcomes and actual results, indicating the need for strengthened coordination, improved monitoring mechanisms, and more accurate forecasting in activity planning. Overall, this research provides insights into the performance of public budget management within the agency and emphasizes the importance of continuous improvement to enhance accountability, operational effectiveness, and the quality of public services delivered to the community.

Keywords: *Efficiency, Effectiveness, Budget Implementation, Public Sector Accounting, Library Services, Archival Management.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak selama Tahun Anggaran 2022–2024 berdasarkan perspektif akuntansi sektor publik. Analisis dilakukan untuk menilai sejauh mana proses perencanaan, penganggaran, serta realisasi program dan kegiatan mencerminkan prinsip value for money, yang meliputi aspek ekonomis, efisien, dan efektif dalam pengelolaan keuangan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder berupa laporan realisasi anggaran, indikator kinerja program, serta dokumen perencanaan perangkat daerah. Efisiensi diukur melalui perbandingan antara realisasi belanja dan output kegiatan, sedangkan efektivitas dilihat dari tingkat pencapaian sasaran program yang mencakup peningkatan layanan perpustakaan, pengelolaan arsip, dan penguatan literasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan terdapat variasi kinerja pada masing-masing tahun, dipengaruhi oleh ketepatan perencanaan, kapasitas organisasi, ketersediaan sumber daya, serta dinamika kebijakan. Meskipun tingkat penyerapan anggaran relatif stabil, beberapa kegiatan masih menunjukkan ketidaksesuaian antara target dan realisasi, sehingga diperlukan peningkatan akurasi perencanaan, penguatan koordinasi pelaksanaan, dan optimalisasi mekanisme monitoring dan evaluasi. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai kualitas pengelolaan anggaran pada dinas terkait dan menekankan pentingnya peningkatan berkelanjutan untuk mendukung akuntabilitas, transparansi, serta kualitas layanan publik.

Kata Kunci: Efisiensi, Efektivitas, Pelaksanaan Anggaran, Akuntansi Sektor Publik, Perpustakaan, Kearsipan.



INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak selama periode Tahun Anggaran 2022–2024 berdasarkan prinsip-prinsip Akuntansi Sektor Publik. Analisis dilakukan dengan membandingkan realisasi anggaran terhadap output dan capaian kinerja program, menggunakan indikator efisiensi (perbandingan input terhadap output) dan efektivitas (tingkat pencapaian target terhadap realisasi hasil).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran berada pada kategori efisien hingga sangat efisien, ditandai dengan penggunaan anggaran yang cenderung di bawah pagu namun tetap menghasilkan output kegiatan sesuai rencana. Sementara itu, tingkat efektivitas menunjukkan variasi antar tahun; pada beberapa program capaian hasil kinerja berada pada kategori efektif, namun pada program tertentu terjadi penurunan efektivitas akibat keterbatasan sumber daya, penyesuaian kebijakan, serta rendahnya partisipasi pemangku kepentingan.

Penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah peningkatan kinerja anggaran, yaitu: (1) memperkuat perencanaan anggaran berbasis kinerja melalui analisis kebutuhan yang lebih komprehensif; (2) meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang perpustakaan dan kearsipan; (3) memperluas kolaborasi dengan sekolah, komunitas literasi, dan perangkat daerah untuk meningkatkan

partisipasi masyarakat; (4) mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam layanan perpustakaan dan kearsipan; serta (5) memperbaiki mekanisme monitoring dan evaluasi untuk memastikan ketercapaian outcome yang terukur dan selaras dengan tujuan strategis organisasi.

Secara keseluruhan, pelaksanaan anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak pada periode penelitian dapat dikategorikan cukup efisien dan efektif, meskipun masih diperlukan peningkatan pada aspek perencanaan berbasis kinerja, optimalisasi belanja, serta penguatan monitoring dan evaluasi agar kinerja anggaran lebih selaras dengan tujuan pelayanan publik.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala limpahan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022-2024 ditinjau dari Perspektif Akuntansi Sektor Publik”**

Laporan skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Program Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung. Selama proses bimbingan proposal skripsi peneliti mendapatkan motivasi, serta dukungan dari pihak lain, oleh sebab itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Heru Sulistyono, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
2. Ibu Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
3. Ibu Hani Werdi Apriyanti, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan motivasi dalam menyusun proposal penelitian ini,
4. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pengajaran bekal ilmu pengetahuan

serta seluruh staf tata usaha dan perpustakaan atas segala bantuan selama proses penyusunan proposal penelitian ini hingga selesai,

5. Bapak, Ibu, keluarga dan teman teman tercinta atas segala doa, perhatian, dukungan, yang tulus selama ini.

Penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, masih diperlukan saran dan kritik untuk membangun penyusunan yang baik. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang memerlukan.

Semarang, 21 November 2025

Peneliti



Ummi Rahmawati



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Landasan Teori	6
4.2.1 Efektivitas.....	6
4.2.2 Efisiensi	9
4.2.3 Anggaran	13
4.2.4 Belanja.....	22
4.2.5 Anggaran Sektor Publik.....	23
2.2 Penelitian Terdahulu	24
2.3 Kerangka Pemikiran	26
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Jenis Penelitian	29
3.2 Sumber dan Jenis Data.....	29
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	29
3.4 Variabel, Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	30
3.4.1 Variabel	30
3.5 Metode Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian	33
4.2 Hasil Analisis.....	33
4.2.1 Tingkat Efisiensi Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak	33
4.2.2 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak	36
4.2.3 Pembahasan	37
BAB V PENUTUP	48

5.1 Simpulan.....	48
5.2 Implikasi.....	48
5.3 Keterbatasan Penelitian	49
5.4 Agenda Penelitian yang akan datang	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi sektor publik, termasuk lembaga pemerintahan daerah, memegang peranan krusial dalam memberikan pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak mengelola sejumlah besar dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengelolaan dana publik ini menuntut akuntabilitas dan transparansi yang tinggi sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, sebagaimana diamanatkan dalam prinsip-prinsip Akuntansi Sektor Publik (ASP) (Mardiasmo, 2009).

Dalam kerangka ASP, anggaran merupakan instrumen perencanaan, pengendalian, sekaligus alat penilaian kinerja. Oleh karena itu, keberhasilan suatu instansi publik tidak hanya diukur dari penyerapan anggaran secara kuantitas, tetapi juga dari sejauh mana dana tersebut digunakan secara bijak untuk mencapai tujuan organisasi (Halim, 2017: 55). Konsep *Value for Money* menjadi parameter utama yang mengharuskan setiap pengeluaran publik memenuhi tiga aspek kunci: ekonomis, efisien, dan efektif (Bastian, 2006).

Penilaian kinerja keuangan publik, khususnya melalui analisis efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran, menjadi sangat penting. Efisiensi

berkaitan dengan perbandingan antara output yang dihasilkan dengan input (sumber daya) yang digunakan—di mana penggunaan sumber daya harus diminimalkan untuk mencapai hasil tertentu. Sementara itu, efektivitas berfokus pada hubungan antara output dengan tujuan atau sasaran yang diharapkan (outcome), yang mengukur sejauh mana tujuan organisasi telah tercapai (Mahsun, 2016).

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak memiliki mandat strategis dalam meningkatkan literasi, memelihara arsip daerah, dan menyediakan layanan informasi yang mendukung pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Demak (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak, 2024). Optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan, seperti perpustakaan keliling, literasi digital, dan pembinaan kearsipan, sangat bergantung pada pengelolaan anggaran yang efisien dan efektif. Realitasnya, masih banyak organisasi sektor publik di Indonesia menghadapi tantangan dalam daya serap anggaran dan potensi pemborosan atau salah sasaran dalam belanja daerah, yang mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan anggaran (Pappa, 2022).

Penelitian ini memfokuskan analisis pada pelaksanaan anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak selama Tahun Anggaran 2022-2024. Pemilihan periode ini relevan untuk menilai kinerja anggaran dalam rentang waktu yang mencakup perencanaan, implementasi, dan potensi penyesuaian anggaran tahunan.

Dengan mempertimbangkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak. Dari penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan informasi yang komprehensif kepada pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan alokasi dan pelaksanaan anggaran di masa mendatang, sehingga tercipta pengelolaan keuangan daerah yang lebih akuntabel dan berorientasi pada kinerja (publik) (Sumange, 2013).

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka peneliti berminat untuk menyusun penelitian dengan judul: “ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ANGGARAN PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2022-2024 DITINJAU DARI PERSPEKTIF AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan kerangka pemikiran Akuntansi Sektor Publik (ASP) yang menuntut pengelolaan keuangan daerah berorientasi pada prinsip *Value for Money* (ekonomis, efisien, dan efektif), serta menimbang peran strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak dalam pelayanan publik, menjadi krusial untuk mengevaluasi kinerja pertanggungjawaban fiskal. Kesenjangan antara harapan akuntabilitas dan potensi tantangan implementasi anggaran (seperti inefisiensi atau inefektivitas) menuntut dilakukannya analisis mendalam terhadap realisasi belanja. Oleh karena itu,

penelitian ini dirumuskan untuk menguji seberapa jauh dana publik yang dikelola oleh dinas tersebut telah digunakan secara optimal dalam mencapai mandat organisasi.

1.3 Pertanyaan Masalah

Dari rumusan permasalahan sebagaimana tersebut diatas maka muncullah pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak selama Tahun Anggaran 2022-2024?
2. Bagaimanakah tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak dalam mencapai sasaran program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2022-2024?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak selama Tahun Anggaran 2022-2024
2. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak dalam mencapai sasaran program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2022-2024

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat bagi pihak-pihak tertentu yang berkepentingan dalam bidang akuntansi. Berikut manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini kedepan diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat untuk mengembangkan penelitian selanjutnya dengan tujuan untuk lebih memahami peningkatan Efisiensi dan Efektivitas dalam penggunaan anggaran.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran atau evaluasi bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak dalam peningkatan pelaksanaan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran belanja.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat mendukung penelitian yang berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran belanja.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

4.2.1 Efektivitas

2.1.1.1 Pengertian Efektivas

Efektivitas merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kinerja organisasi, terutama dalam konteks pelaksanaan anggaran di sektor publik. Efektivitas menunjukkan sejauh mana kegiatan, program, atau kebijakan yang dilaksanakan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan kata lain, efektivitas lebih menekankan pada hasil (*outcome*) yang dicapai dibandingkan dengan sekadar penggunaan sumber daya atau input.

Menurut Mahmudi (2019:92), efektivitas adalah hubungan antara keluaran (*output*) dengan tujuan (*outcome*), di mana suatu kegiatan dikatakan efektif apabila hasil yang diperoleh dapat mencapai sasaran yang telah direncanakan. Artinya, semakin besar andilnya output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin tinggi pula tingkat efektivitasnya. Sejalan dengan hal tersebut, Mardiasmo (2018:134) menyatakan bahwa efektivitas merupakan ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas berkaitan dengan *doing*

the right things, yakni melakukan kegiatan yang benar dan sesuai dengan sasaran program.

Sementara itu, Siagian (2016:24) menjelaskan bahwa efektivitas menggambarkan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan dari segi kualitas, kuantitas, dan waktu yang telah ditetapkan. Kegiatan dikatakan efektif apabila hasil yang dicapai sesuai atau bahkan melampaui target yang telah direncanakan. Dalam konteks akuntansi sektor publik, efektivitas mencerminkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan program-program yang direncanakan sehingga memberikan hasil nyata bagi masyarakat (Bastian, 2019:176).

Lebih lanjut, menurut Prasetyo dan Nugraheni dalam Bili et al., (2025), efektivitas merupakan suatu ukuran untuk mengetahui berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Dalam hal ini, anggaran pemerintah daerah bisa dikatakan efektif jika target yang telah ditetapkan dapat dicapai dalam satu periode tertentu. Pengukuran efektivitas tidak berfokus pada besarnya dana yang digunakan, melainkan pada sejauh mana tujuan yang direncanakan dapat direalisasikan oleh pemerintah.

Hal senada disampaikan oleh (Rinaldi et al., 2024) yang menegaskan bahwa dalam konteks sektor publik, efektivitas menjadi sangat penting mengingat sebagian besar penerimaan pemerintah bersumber dari pajak masyarakat. Masyarakat yang

membayar pajak tentunya mengharapkan agar dana tersebut digunakan secara optimal dan menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, pemerintah wajib mengelola dan membelanjakan dana publik secara efektif agar tujuan pembangunan dan pelayanan publik dapat tercapai dengan baik.

Dengan demikian, efektivitas pelaksanaan anggaran dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan instansi pemerintah dalam merealisasikan program dan kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Semakin tinggi tingkat kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan target yang telah ditetapkan, maka semakin efektif pula pelaksanaan anggaran tersebut. Dalam penelitian ini, efektivitas diukur berdasarkan sejauh mana realisasi program dan kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022–2024 mampu mencapai sasaran kinerja yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan seperti *Rencana Strategis (Renstra)* dan *Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)*.

2.1.1.2 Cara Pengukuran Efektifitas Belanja

Efektifitas belanja merupakan ratio hasil perbandingan antara Anggaran Belanja yang direncanakan dengan Realisasi Anggaran yang dibelanjakan. Efektifitas ini tentunya memiliki

tujuan yakni guna mengetahui sejauh mana kemampuan pemerintah dalam merancang target belanja sebagaimana ditetapkan sebagai pagu anggaran, dan sejauh mana pemerintah dapat merealisasikan anggaran belanja yang didapatkan. Pengukuran Efektifitas Belanja juga dilakukan dengan tujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Daerah. Hal ini menjadi salah satu langkah penting dalam mengambil keputusan khususnya dalam melakukan evaluasi kinerja atas sejauh mana anggaran dapat direalisasikan. Perhitungan Efektivitas Pendapatan dan Belanja juga merupakan langkah untuk mengetahui bahwa sumberdaya yang digunakan sesuai dengan alokasinya, guna menciptakan tujuan yang lebih optimal serta bertanggung jawab.

Pengukuran Efektivitas :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

4.2.2 Efisiensi

2.1.2.1 Pengertian Efisiensi

Efisiensi merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kinerja organisasi, baik pada sektor swasta maupun sektor publik. Dalam konteks manajemen keuangan publik, efisiensi mencerminkan sejauh mana pemerintah mampu menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal untuk menghasilkan

output atau hasil tertentu dengan biaya yang minimal. Dengan kata lain, efisiensi menunjukkan kemampuan suatu organisasi dalam mencapai hasil yang maksimal dengan penggunaan input serendah mungkin.

Menurut Mulyadi (2016: 95), efisiensi adalah kemampuan suatu organisasi untuk mencapai hasil tertentu dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal tanpa adanya pemborosan waktu, tenaga, dan biaya. Sementara itu, Mahmudi (2019: 124) menjelaskan bahwa efisiensi dalam sektor publik merupakan perbandingan antara realisasi output dengan input yang digunakan. Semakin besar output yang dihasilkan dari jumlah input yang sama, maka tingkat efisiensi semakin tinggi.

Efisiensi juga memiliki peranan penting dalam bidang ekonomi dan pemerintahan. Kurniawan dan Murtala dalam Bili et al., (2025) menyatakan bahwa efisiensi merupakan suatu indikator dalam mengukur tingkat output dengan input sekecil mungkin namun menghasilkan sesuatu yang baik melalui strategi yang tepat. Dalam kaidah ilmu ekonomi, efisiensi mencerminkan upaya memaksimalkan penggunaan dan pemanfaatan sumber daya dalam suatu kegiatan/aktivitas ekonomi maupun pemerintahan untuk mengoptimalkan alokasi pendapatan dan pengeluaran agar tercipta pengelolaan yang efisien.

Lebih lanjut, (Usman, 2024) mengemukakan bahwa konsep efisiensi dalam bidang ekonomi merujuk pada upaya minimalisasi input, penghindaran pemborosan, serta produksi dengan biaya rendah. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi bukan hanya diukur dari sisi keuangan, tetapi juga dari proses dan hasil yang dicapai dengan sumber daya yang terbatas.

Dalam konteks akuntansi sektor publik, efisiensi anggaran menjadi salah satu kriteria utama dalam menilai keberhasilan program pemerintah dari aspek keuangan. Halim dan Kusufi (2014: 75) menjelaskan bahwa efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah mencerminkan sejauh mana penggunaan anggaran pemerintah dapat menghasilkan manfaat dan layanan publik secara optimal tanpa pemborosan. Sementara itu, (Supriyanto et al., 2018) menyebutkan bahwa prinsip efisiensi anggaran merupakan perbandingan antara hasil atau output (pendapatan) dengan faktor produksi atau input (biaya pelayanan). Kegiatan dikatakan efisien apabila pendapatan atau hasil yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan.

Dalam evaluasi pelaksanaan anggaran, efisiensi dapat dibedakan menjadi efisiensi kebijakan anggaran dan efisiensi pelaksanaan program. Efisiensi kebijakan anggaran berkaitan dengan seberapa tepat pemerintah dalam mengalokasikan sumber

daya ke program yang memberikan manfaat paling besar, sedangkan efisiensi pelaksanaan program berfokus pada bagaimana kegiatan yang direncanakan dijalankan dengan penggunaan anggaran seminimal mungkin tanpa mengurangi kualitas hasil yang dicapai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, efisiensi dalam penerapan anggaran dapat diukur dengan membandingkan antara realisasi belanja dan anggaran yang telah ditetapkan. Jika realisasi belanja lebih kecil dari anggaran dan capaian output sesuai dengan target, maka pelaksanaan anggaran tersebut dapat dikatakan efisien.

2.1.2.2 Cara Pengukuran Efisiensi Belanja

Efisiensi pelaksanaan anggaran dapat diukur menggunakan perbandingan realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja. Di mana, belanja langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Oleh karena ini pengukuran efisiensi pelaksanaan belanja dikaitkan dengan seberapa efisien pelaksanaan belanja langsung terhadap total belanja. Semakin efisien sumber daya (input) yaitu realisasi anggaran belanja khususnya anggaran belanja langsung maka semakin efisien pelaksanaan program/ kegiatan (Arisandi, 2018).

$$\text{Rasio Efisiensi Anggaran} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi Anggaran} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Adapun dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 tahun 1996 terdapat kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja sebagai berikut :

Persentase Pengukuran Kriteria Efisiensi

100% Ke atas	Tidak Efisien
90% sampai 100%	Kurang Efisien
80% sampai 90%	Cukup Efisien
60% sampai 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber: Kemendagri Tahun 1996 No. 690.900.327.2016

4.2.3 Anggaran

Anggaran merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem akuntansi sektor publik yang berfungsi sebagai alat perencanaan, pengendalian, koordinasi, dan evaluasi kinerja keuangan pemerintah. Melalui anggaran, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya publik secara terarah untuk mencapai tujuan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2018:61), anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Anggaran tidak hanya mencerminkan rencana pendapatan dan belanja, tetapi juga menjadi alat untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program kerja pemerintah.

Sementara itu, Halim (2016:24) menyatakan bahwa anggaran adalah rencana keuangan yang disusun secara sistematis meliputi seluruh kegiatan organisasi dalam jangka waktu tertentu, yang dinyatakan dalam satuan moneter. Dalam konteks organisasi publik, anggaran digunakan untuk menjamin bahwa pengelolaan dana publik dilakukan secara efisien, efektif, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Mahmudi (2019:89), anggaran sektor publik merupakan rencana kegiatan pemerintah yang dituangkan dalam bentuk angka-angka, yang berfungsi sebagai alat pengendalian, koordinasi, serta komunikasi kebijakan fiskal kepada masyarakat. Oleh karena itu, anggaran publik tidak hanya berorientasi pada input (pengeluaran), tetapi juga pada hasil (output) dan manfaat (outcome) yang dicapai.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan anggaran sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah. Definisi ini menegaskan bahwa penyusunan anggaran

merupakan proses politik dan administratif yang menggabungkan aspek kebijakan publik dengan aspek teknis pengelolaan keuangan.

Lebih lanjut, Ritonga (2021) menjelaskan bahwa penganggaran merupakan rencana keuangan yang secara sistematis menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material, dan sumber daya lainnya. Dalam konteks pemerintahan, sistem penganggaran dikembangkan untuk melayani berbagai tujuan seperti pengendalian keuangan, perencanaan manajemen, penetapan prioritas penggunaan dana, serta pertanggungjawaban kepada publik.

Ritonga juga menekankan bahwa integrasi antara rencana kerja tahunan (RKT) sebagai rencana operasional dan rencana strategis (Renstra) dengan anggaran tahunan merupakan bagian penting dari penerapan anggaran berbasis kinerja. Dalam sistem ini, anggaran tidak hanya berfokus pada berapa banyak dana yang digunakan, tetapi juga pada seberapa besar hasil dan manfaat yang dicapai dari penggunaan dana tersebut. Elemen-elemen penting yang harus diperhatikan dalam penganggaran berbasis kinerja meliputi keterkaitan antara input, output, dan outcome; indikator kinerja yang terukur; serta sistem evaluasi yang transparan dan akuntabel.

Dari berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa anggaran dalam sektor publik adalah rencana keuangan yang disusun secara sistematis untuk mengalokasikan sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta berfungsi

sebagai alat perencanaan, pengendalian, koordinasi, dan evaluasi kinerja pemerintah. Dalam perspektif akuntansi sektor publik, anggaran menjadi instrumen penting dalam mewujudkan prinsip *value for money* yang mencakup aspek efisiensi, efektivitas, dan ekonomis dalam pengelolaan keuangan daerah. Elemen-elemen yang penting untuk diperhatikan dalam penganggaran berbasis kinerja adalah :(Ritonga, 2021)

1. Tujuan yang disepakati dan ukuran tercapainya.
2. Pengumpulan informasi yang sistematis atas realisasi pencapaian kinerja dapat diandalkan dan konsisten, sehingga dapat diperbandingkan antara biaya dengan prestasinya.

Kondisi yang harus disiapkan sebagai faktor pemicu keberhasilan implementasi penggunaan anggaran berbasis kinerja, yaitu:

1. Kepemimpinan dan komitmen dari seluruh komponen organisasi.
2. Fokus penyempurnaan administrasi secara terus menerus.
3. Sumber daya yang cukup untuk usaha penyempurnaan tersebut (uang, waktu dan orang).
4. Penghargaan dan sanksi yang jelas.
5. Keinginan yang kuat untuk berhasil.

Anggaran merupakan instrument penting di dalam manajemen karena merupakan bagian dari fungsi manajemen. Di dunia bisnis maupun di organisasi sektor publik, termasuk pemerintah, anggaran merupakan bagian dari aktivitas penting yang dilakukan secara rutin.

Dalam rangka penyusunan anggaran terdapat beberapa prinsip penganggaran yang perlu dicermati, yaitu:

2.1.3.1 Karakteristik Anggaran

Anggaran merupakan rencana manajemen yang mendasarkan asumsi bahwa upaya konstruktif akan diambil dalam penyusunan anggaran agar realisasi kegiatan dapat tercapai secara optimal sebagaimana dengan rencana yang telah disusun. Sedangkan perkiraan atau prognosis hanya merupakan prediksi mengenai apa yang akan terjadi. Mulyadi (2015) mengatakan terdapat beberapa karakteristik anggaran yaitu antara lain :

- 1) Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan keuangan lainnya.
- 2) Umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa tahun.
- 3) Memiliki kecakapan manajemen untuk menjalankan dan bertanggung jawab dalam pengadaan barang yang telah ditetapkan dalam anggaran.
- 4) Proposal anggaran disahkan oleh pihak yang berwenang dalam menetapkan anggaran.
- 5) Setelah disahkan, anggaran hanya dapat direvisi dalam keadaan tertentu.

Dari karakteristik anggaran sebagaimana tersebut diatas dapat dipahami bahwa anggaran merupakan bagian terpenting

untuk manajemen dalam menjalankan pekerjaan. Sebagai instrument dalam mencapai target, anggaran dapat dipercaya karena disusun berdasarkan penelitian data periode yang lalu dan perkiraan masa yang akan datang

2.1.3.2 Prinsip-Prinsip Anggaran

Adapun prinsip-prinsip anggaran yang dijadikan dasar pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Otorisasi oleh legislatif, anggaran publik harus mendapatkan persetujuan dari lembaga legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat melaksanakan dan membelanjakan anggaran tersebut.
- 2) Komprehensif, anggaran harus dapat menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran yang dikelola pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana diluar anggaran pada dasarnya tidak sesuai dengan prinsip anggaran yang bersifat komprehensif.
- 3) Kondisi anggaran yang lengkap, terpadu dan konsisten, semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam kas umum pemerintah daerah.
- 4) Pengeluaran yang menjadi kewajiban yang jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus dapat dimanfaatkan secara optimal dan dapat dipertanggungjawabkan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

- 5) Masa Pelaksanaan Anggaran, anggaran merupakan suatu proses yang periodik, sehingga penyusunan dan pelaksanaannya bisa bersifat tahunan maupun multi tahunan.
- 6) Akurat, estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan dana cadangan yang tersembunyi, yang dapat dijadikan sebagai pundi-pundi pemborosan dan inefisiensi anggaran serta dapat memunculkan ketidakpercayaan pencapaian pendapatan dan kelebihan pelaksanaan pengeluaran.
- 7) Jelas, anggaran hendaknya sederhana namun dapat dipahami oleh masyarakat dan tidak membuat bingung serta memunculkan multi tafsir.
- 8) Diketahui oleh umum, anggaran harus di informasikan secara luas kepada masyarakat.

2.1.3.3 Syarat Dalam Penyusunan Anggaran

Herispon (2015) mengatakan bahwa dalam sebuah proses penyusunan anggaran diperlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi, karena terdapat kemungkinan dalam pelaksanaan anggaran akan mengalami beberapa perubahan dan sebagainya, adapun syarat-syarat tersebut antara lain :

1) Anggaran Realistis

Anggaran yang disusun seharusnya dilihat dari keadaan harga barang yang dibutuhkan, artinya berdasar pada harga yang benar dan meyakinkan pada saat penyusunan anggaran,

sehingga dapat memperkirakan rincian terhadap perubahan harga dimasa yang akan datang.

2) Anggaran Bersifat Fleksibel

Anggaran yang disusun memiliki ruang lingkup yang mudah dalam melakukan revisi, beradaptasi dengan situasi yang bisa saja mengalami perubahan, sehingga anggaran yang dibuat bersifat fleksibel.

3) Anggaran Yang Berkelanjutan

Penyusunan anggaran membutuhkan perhatian secara terus menerus dan merupakan usaha yang insidentil. Dalam penyusunan anggaran perusahaan mempunyai keyakinan bahwa perusahaan mempunyai kemampuan mengendalikan berbagai relevan variabel dalam mencapai tujuan, untuk melaksanakan sistem manajemen ilmiah, untuk berkomunikasi secara efektif, untuk memberi motivasi kepada anggotanya, untuk mendorong adanya motivasi.

2.1.3.4 Fungsi Anggaran

Sujarweni (2015) dalam organisasi sektor publik menerapkan sistem anggaran dalam kegiatan operasionalnya, oleh karena itu anggaran memiliki beberapa fungsi sebagai berikut :

- 1) Sebagai alat perencanaan : Anggaran berfungsi sebagai sarana untuk merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan yang akan dilaksanakan oleh lembaga pemerintah dan rincian

anggaran belanja yang dibutuhkan, serta rencana sumber-sumber pendapatan yang diperoleh lembaga pemerintah.

- 2) Sebagai alat pengendalian : Anggaran sebagai sarana pengendalian ini bisa digunakan untuk mengendalikan kekuatan kekuasaan eksekutif.
- 3) Sebagai Alat kebijakan fiskal : Anggaran dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana kebijakan fiskal yang akan dijadikan dasar pelaksanaan oleh lembaga pemerintah, hal ini akan mempermudah untuk mengetahui dampak ekonomi dalam organisasi.
- 4) Sebagai Alat politik : Anggaran merupakan bentuk dokumen politik yang dapat dijadikan komitmen kesepakatan antara eksekutif dan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan masyarakat.
- 5) Sebagai Alat koordinasi dan komunikasi : Dalam proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran dilakukan komunikasi dan koordinasi antar unit kerja kegiatan seluruh bagian organisasi. Anggaran yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja didalam pencapaian tujuan organisasi.
- 6) Sebagai Alat penilaian kerja : Dokumen Anggaran merupakan alat yang efektif untuk melakukan pengendalian dan penilai kinerja. Dimana penilaian kinerja organisasi

sektor publik akan di nilai berdasarkan pencapaian target anggaran serta pelaksanaan efisiensi anggaran.

- 7) Sebagai Alat motivasi : penggunaan anggaran bisa untuk memberi motivasi bagi pimpinan dan karyawan dalam bekerja secara efektif dan efisien. Dengan membuat anggaran yang tepat dan dapat melaksanakan sesuai target dan tujuan organisasi, maka manajemen dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik.
- 8) Sebagai Alat menciptakan ruang bebas untuk umum : keberadaannya tidak boleh diabaikan oleh berbagai organisasi sektor publik seperti birokrat, DPR/MPR, masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya. Beberapa pihak tersebut terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penganggaran publik. Kelompok masyarakat yang terorganisir juga akan selalu berusaha untuk mempengaruhi besarnya anggaran pemerintah. Sedangkan kelompok masyarakat yang tidak terorganisir akan mempercayakan pendapat dan aspirasinya melalui proses politik yang ada.

4.2.4 Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh bendaharawan umum pemerintah yang mengurangi saldo anggaran untuk suatu periode yang lebih besar dari periode pelaporan

yang tidak akan diperoleh penggantian dari bendahara umum daerah dan bendahara umum negara. Belanja daerah adalah belanja pemerintah yang berupa belanja langsung maupun tidak langsung yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan program-program public. Beban tersebut terdiri dari beban pegawai, beban peralatan, dan beban lain-lain. untuk menunjang pelaksanaan kegiatan yang telah ditentukan. (Arizona & Juliana, 2022).

4.2.5 Anggaran Sektor Publik

Anggaran sektor publik berisi rencana kegiatan yang di sajikan dalam bentuk rencana sumber pendapatan dan belanja dalam satuan keuangan. Anggaran publik merupakan dokumen yang mencerminkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Pada dokumen Anggaran juga berisi perkiraan mengenai apa yang akan dilakukan organisasi pada periode berikutnya. Setiap anggaran, memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang.

Anggaran negara adalah: “suatu pernyataan tentang perkiraan Anggaran pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi dalam suatu periode dimasa yang akan datang, serta data dari pengeluaran dan penerimaan yang sungguh-sungguh terjadi dimasa sebelumnya” (Ulum, 2008:98).

Lebih lanjut Ulum (2008:98) berdasarkan pengertian anggaran negara diatas maka melalui anggaran negara tidak hanya dapat diketahui

besarnya rencana penerimaan dan pengeluaran pemerintah untuk suatu periode dimasa yang akan datang, akan tetapi juga dapat diketahui mengenai penerimaan dan pengeluaran negara yang benar-benar terjadi diperiode sebelumnya. Sehingga, secara lebih terinci dapat pula dinyatakan bahwa anggaran negara adalah cerminan dari kebijaksanaan pemerintah yang diukur dalam pernyataan uang, yang meliputi kebijaksanaan pengeluaran pemerintah pada suatu periode dimasa yang akan datang maupun kebijaksanaan penerimaan pemerintah untuk menutup rencana pengeluaran tersebut. Selain menguraikan kebijaksanaan pemerintah untuk suatu periode dimasa depan, dari anggaran negara dapat diketahui pula realisasi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah pada periode sebelumnya. Sehingga melalui anggaran negara dapat dilihat tercapai dan tidak tercapainya kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah dimasa lalu, serta maju atau mundurnya kebijaksanaan yang hendak dicapai pemerintah dimasa yang akan datang. (Ulum, 2008:98).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat melengkapi teori yang digunakan dalam kajian penelitian yang dilakukan. Peneliti mengangkat beberapa penelitian sebelumnya sebagai referensi pada lokasi penelitian yang berbeda. Berikut ini penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1	Betty Indriati & Supardal, (2023)	Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan berbasis SIMARDA di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman	Efisiensi & Efektivitas Pelayanan Kearsipan berbasis Sistem Informasi	Efisiensi anggaran alat tulis kantor, penjilidan, ruang; efektivitas pada proses administrasi; akuntabilitas informasi proses
2	Dina Arum Ambar Wati dkk., (2022)	Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal	Efektivitas dan Efisiensi Penyerapan Anggaran	Efektivitas seluruhnya efektif; efisiensi rata-rata efisien.
3	Marniati dkk. (2023)	Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tana Toraja	Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran	Fokus pada analisis efektivitas dan efisiensi anggaran
4	A. Amelinda, Monang Situmorang, Ellyn Octavianty, Yan Noviar Nasution (2022).	Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan	Efisiensi dan Efektivitas penyerapan anggaran	Efisiensi seluruhnya efisien; efektivitas seluruhnya tidak efektif

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
		Ruang Kota Depok (2015-2019).		
5	Ramadhani dkk. (2023).	Evaluasi Penganggaran PAD dan Efektivitas–Efisiensi Belanja Pemda Kota Bogor	PAD, Efektivitas Belanja, Efisiensi Belanja	PAD relatif optimal, efektivitas tinggi, tetapi efisiensi belanja masih fluktuatif.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu maka disusun kerangka penelitian sebagai berikut :

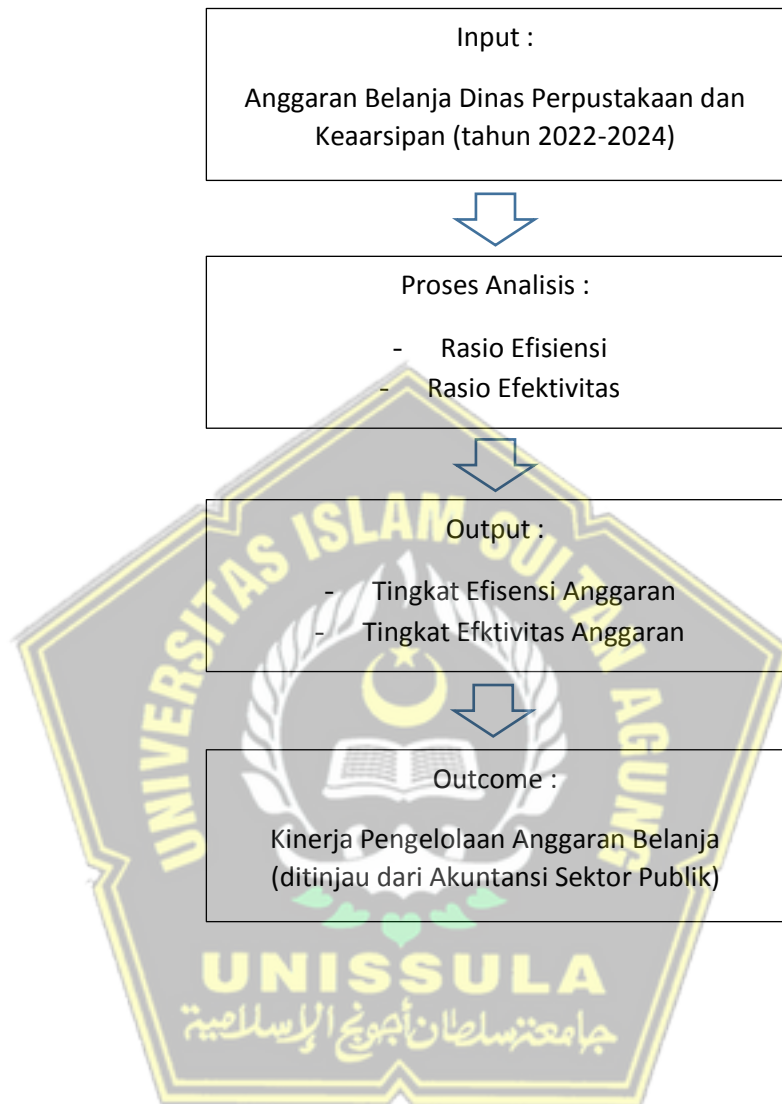
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja pengelolaan anggaran belanja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam periode tahun 2022 hingga 2024. Tahap awal adalah mengumpulkan Input, yang dalam konteks ini adalah data mengenai Anggaran Belanja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (tahun 2022-2024). Data anggaran ini menjadi dasar material yang akan diolah dan dianalisis.

Input tersebut kemudian melalui Proses Analisis. Proses ini dilakukan dengan menghitung dan menganalisis dua rasio utama: 1) Rasio Efisiensi, yang mengukur seberapa baik sumber daya (anggaran) digunakan untuk mencapai hasil tertentu. 2) Rasio Efektivitas, yang mengukur seberapa jauh tujuan atau target yang telah ditetapkan dapat dicapai melalui penggunaan anggaran tersebut.

Dari hasil Proses Analisis tersebut, akan didapatkan Output penelitian, yaitu kesimpulan mengenai: 1) Tingkat Efisiensi Anggaran, yang menunjukkan seberapa efisien pengelolaan anggaran yang telah dilakukan. 2) Tingkat Efektivitas Anggaran, yang menunjukkan seberapa efektif anggaran tersebut dalam mencapai program kerja dan tujuan dinas.

Keseluruhan tahapan Input, Proses, dan Output ini akan menghasilkan Outcome penelitian. Outcome ini merupakan kesimpulan menyeluruh mengenai Kinerja Pengelolaan Anggaran Belanja dinas tersebut, yang akan ditinjau dari perspektif Akuntansi Sektor Publik. Tinjauan ini akan memberikan penilaian mendalam tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik dinas.





BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif Case Study. Kuantitatif *case study* adalah jenis penelitian studi kasus yang menggunakan data numerik atau kuantitatif untuk menganalisis, menjelaskan, atau memahami suatu fenomena, kasus, atau masalah tertentu secara mendalam (Sugiyono, 2019). Penelitian ini membatasi fokusnya hanya pada satu entitas tunggal yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak. Pembatasan ini adalah ciri khas dari studi kasus, yang berupaya memberikan analisis mendalam pada unit tunggal.

3.2 Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari website dinperpusar.demakkab.go.id pada tahun 2022-2024. Sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Datta sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen resmi pengelolaan keuangan perangkat daerah, khususnya pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak. Data sekunder tersebut berupa laporan realisasi anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, serta data capaian kinerja dinas pada Tahun Anggaran 2022–2024.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan studi kepustakaan (library research). Teknik dokumentasi merupakan penggunaan tulisan, karya monumental dan gambar seseorang sebagai bukti dari peristiwa (Sugiyono, 2019). Dalam melaksanakan penelitian ini dengan mempelajari beberapa studi literatur, artikel, buku bacaan, majalah, internet, dan sumber data sekunder. Sumber data yang digunakan sebagai referensi dalam studi literatur bersumber dari media sosial dengan menggunakan situs dinperpusar.demakkab.go.id, serta sejumlah buku bacaan dan publikasi ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang berhubungan dengan penelitian guna memperkuat validitas data.

3.4 Variabel, Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.4.1 Variabel

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel efisiensi dan variabel efektivitas pelaksanaan anggaran. Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang terbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik suatu kesimpulan (Sugiyono, 2019).

3.4.1.1 Variabel Efisiensi Pelaksanaan Anggaran

Efisiensi pelaksanaan anggaran adalah tingkat perbandingan antara jumlah realisasi anggaran dengan jumlah anggaran yang telah ditetapkan, yang menunjukkan sejauh mana penggunaan anggaran dapat dilakukan secara hemat tanpa mengurangi capaian output yang direncanakan.

Rumus Efisiensi dalam penelitian ini adalah :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran yang ditetapkan}} \times 100 \%$$

Tabel 3.1

Kriteria Efisiensi Pelaksanaan Anggaran (Mahmudi, 2019)

< 60%	Sangat Efisien
60 – 80%	Efisien
80 – 90 %	Cukup Efisien
90 – 100 %	Kurang Efisien
>100 %	Tidak Efisien

3.4.1.2 Variabel Efektivitas Pelaksanaan Anggaran

Efektivitas pelaksanaan anggaran adalah tingkat ketercapaian hasil (outcome) program atau kegiatan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Anggaran dinyatakan efektif apabila realisasi capaian mendekati atau bahkan melampaui target.

$$\text{Rasio Efektivitas} = (\text{Realisasi Capaian} \div \text{Target Capaian}) \times 100\%$$

Tabel 3.2

Kriteria Efektivitas Pelaksanaan Anggaran

>100 %	Sangat Efektif
90 – 100%	Efektif
80 – 90 %	Cukup Efektif
60 – 80 %	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sugiyono (2019).

3.5 Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan pendekatan rasio keuangan sektor publik. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi nyata pelaksanaan anggaran berdasarkan data anggaran yang ditetapkan dan realisasi anggaran selama periode penelitian, sedangkan pendekatan kuantitatif dilakukan dengan menghitung nilai rasio efisiensi dan rasio efektivitas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak ditinjau dari perspektif akuntansi publik. Populasi pada penelitian ini adalah Laporan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022-2024.

Laporan realisasi anggaran belanja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak pada tahun anggaran 2022 s/d 2024 dapat dilihat di tabel berikut ini :

Tabel 4.1

Laporan Realisasi Anggaran

No	Tahun	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
1.	2022	6.168.740.058	5.943.232.120
2.	2023	5.470.646.800	5.074.090.305
3.	2024	6.211.033.100	6.107.222.377

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak (2022-2024)

4.2 Hasil Analisis

4.2.1 Tingkat Efisiensi Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak

Untuk mengetahui tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran pada

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak periode 2022 s.d 2024 didapat dengan menggunakan pengukuran rasio efesiensi. Pengukuran rasio ini dilakukan dengan cara membagi anggaran dengan realisasi anggaran dinas.

$$\text{Rasio Efisiensi} = (\text{Anggaran yang ditetapkan} \div \text{Realisasi Anggaran}) \times 100\%$$

Tabel 4.1

Rasio Efisiensi Pelaksanaan Anggaran

No	Tahun	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisien	Keterangan
1.	2022	6.168.740.058	5.943.232.120	96,34	Kurang Efisien
2.	2023	5.470.646.800	5.074.090.305	92,75	Kurang Efisien
3.	2024	6.211.033.100	6.107.222.377	98,33	Kurang Efisien

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak (2022-2024)

Pada tahun 2022 persentase tingkat efisiensi penyerapan anggaran diangka 96,34%, di tahun 2023 presentase tingkat efisiensi menurun di angka 92,75%, sedangkan pada tahun 2024 tingkat efisensi kembali meningkat diangka 98.33%.

Anggaran pada tahun 2022 lebih besar daripada tahun 2023, sedangkan tahun 2024 anggaran kembali meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023.

Berdasarkan data tersebut, hal yang menyebabkan presentase efisiensi ini kurang efisien selama 3 (tiga) tahun berturut – turut karena penggunaan realisasi anggaran belanja begitu besar, dimana pada tahun 2022 anggaran yang direalisasikan sebesar Rp. 5.943.232.120 dari Rp 6.158.740.058 yang dianggarkan. Pada tahun 2023 anggaran yang direalisasikan sebesar Rp. 5.074.090.308 dari Rp 5.470.646.800 yang dianggarkan. Sedangkan pada tahun tahun 2024 anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 6.107.222.377 dari Rp 6.211.033.100 yang dianggarkan. Jika dilihat dari penggunaan realisasi anggaran belanja tiap tahunnya, pengelolaan anggaran belanja ini belum berhasil memenuhi syarat efisiensi yaitu penggunaan dana yang minimum untuk mencapai sasaran.

Dalam perspektif tradisional Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, rasio penyerapan yang tinggi seperti ini umumnya diinterpretasikan sebagai efisiensi belanja yang baik (artinya perencanaan dan pelaksanaan berjalan sesuai target). Namun, jika efisiensi dimaknai secara lebih ketat sebagai kemampuan mencapai sasaran dengan biaya minimum (penghematan), maka temuan ini membawa implikasi yang berbeda.

Tingkat serapan yang konsisten di atas 90% selama tiga tahun berturut-turut mengindikasikan bahwa ruang untuk penghematan biaya (*cost-saving*) sangat minim. Selisih antara anggaran yang dialokasikan dengan yang direalisasikan (dana yang berhasil dihemat) relatif kecil.

Misalnya, pada tahun 2024, dana yang tidak terpakai hanya sekitar 1,67% dari total anggaran.

Oleh karena itu, dalam pandangan yang menekankan pada penghematan, kinerja dinas ini dinilai kurang efisien karena penggunaan realisasi anggaran yang terlalu besar, yaitu nyaris menyentuh pagu yang ditetapkan, sehingga belum berhasil menunjukkan kemampuan untuk menekan biaya input seminimal mungkin dalam mencapai output yang sama.

Tingginya realisasi anggaran ini memerlukan analisis lebih lanjut terkait aspek efektivitas (apakah output dan outcome kinerjanya juga tinggi?) untuk menentukan apakah belanja yang besar tersebut telah menghasilkan manfaat yang sepadan bagi masyarakat Kabupaten Demak.

4.2.2 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak

Untuk mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak periode 2022 s.d 2024 didapat dengan menggunakan pengukuran rasio efektivitas. Pengukuran rasio ini dilakukan dengan cara membagi realisasi capaian dengan Target capaian dinas.

$$\text{Rasio Efektivitas} = (\text{Realisasi Capaian} \div \text{Target Capaian}) \times 100\%$$

Dari pengukuran diatas didapatkan rasio efektivitas pelaksanaan anggaran belanja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak periode 2022-2024 sebagai berikut :

Tabel 4.2

Rasio Efektivitas Pelaksanaan Anggaran

No	Tahun	Target Capaian	Realisasi Capaian	Efektivitas	Keterangan
1.	2022	100	96,34	96,34	Efektif
2.	2023	100	92,75	92,75	Efektif
3.	2024	100	98,33	98,33	Efektif

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan anggaran dikatakan efektif kaarena berada diangka 90 – 100, apabila realisasi capaian anggaran belanja lebih besar dibanding dengan target anggaran belanja, maka pelaksanaan belanja anggaran bisa dikatakan semakin efektif.

4.2.3 Pembahasan

4.2.3.1 Analisis Efisiensi

Efisiensi dalam akuntansi sektor publik mengukur perbandingan antara pagu anggaran dengan realisasi anggaran. Jika realisasi lebih kecil dari pagu, berarti terjadi penghematan, namun belum tentu efisien jika tidak sebanding dengan output

yang dihasilkan. Berikut adalah analisis efisiensi berdasarkan tahun anggaran :

1. Tahun Anggaran 2022

Pada tahun 2022 didapatkan pagu anggaran sebesar Rp 6.168.740.058 terealisasi sebesar Rp 5.943.232.120 atau 95,9% dari pagu, sehingga efisiensi anggaran sebesar 96,34%. Dari hasil diatas dapat dianalisis bahwa meskipun ada penghematan, penggunaan anggaran dikategorikan kurang efisien karena realisasi output tidak maksimal terhadap alokasi dana.

Dapat dipahami bahwa pada tahun anggaran 2022, alokasi dana ditetapkan sebesar Rp 6,17 miliar, dan realisasi mencapai Rp 5,94 miliar, yang berarti tingkat penyerapan sangat tinggi, yakni 96,34%. Selisih pagu dan realisasi hanya sekitar 3,66%, menunjukkan upaya keras untuk menghabiskan anggaran. Namun, meskipun tingkat penyerapan tinggi, analisis menyimpulkan tahun 2022 **dikategorikan kurang efisien**. Penghematan yang kecil tersebut tidak berbanding lurus dengan realisasi *output* yang maksimal. Ini mengindikasikan kemungkinan adanya *over-budgeting* di awal, di mana pagu ditetapkan terlalu tinggi dari kebutuhan riil.

Prosedur atau metode pengadaan barang dan jasa juga berpotensi sebagai penyebabnya, dimana pejabat pengadaan Barang/Jasa kurang optimal dalam melakukan nego terhadap penawaran penyedia guna efisiensi. Selain itu, penyerapan dana yang mendekati 100% seringkali didorong oleh tekanan akhir tahun, yang berisiko menyebabkan pelaksanaan program terburu-buru, sehingga mengurangi kualitas *output* atau gagal mencapai target fisik yang direncanakan.

2. Tahun Anggaran 2023

Pada tahun 2023 didapat pagu sebesar Rp 5.470.646.800 terealisasi sebesar Rp 5.074.090.305 atau 92,75% dari pagu, sehingga efisiensi anggaran 92,75%.

Dari hasil perhitungan diatas dapat dianalisa realisasi relatif rendah dibanding pagu, menunjukkan terdapat sisa anggaran yang besar. Hal ini mencerminkan adanya perencanaan yang kurang akurat atau pelaksanaan program yang belum optimal atau kurang efisien.

Dapat dipahami bahwa tahun 2023 menunjukkan pola yang berbeda. Dengan pagu sebesar Rp 5,47 miliar, realisasi tercatat sebesar Rp 5,07 miliar. Tingkat penyerapan merosot menjadi 92,75%, menyisakan sisa anggaran yang signifikan sebesar 7,25% (sekitar Rp 396 juta).

Tingkat penyerapan yang relatif rendah ini menjadi cerminan nyata dari perencanaan yang kurang akurat. Sisa anggaran yang besar mengindikasikan bahwa estimasi kebutuhan saat penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) jauh melampaui kebutuhan aktual atau, yang lebih kritis, beberapa program yang telah dianggarkan (seperti proyek fisik atau pengadaan) mengalami penundaan atau pembatalan. Selain perencanaan, rendahnya daya serap ini juga dipicu oleh masalah birokrasi, proses pengadaan barang/jasa dengan hasil nego yang cukup baik, serta lemahnya *commitment* dari unit pelaksana, yang semuanya berujung pada dana yang tidak tersalurkan secara optimal.

3. Tahun Anggaran 2024

Sedangkan pada tahun 2024 diperoleh pagu sebesar Rp 6.211.033.100 dengan realisasi anggaran Rp 6.107.222.377 atau 98,33% dari pagu, sehingga efisiensi anggaran 98,33%.

Dari data tersebut diatas dapat dianalisa bahwa realisasi anggaran mendekati pagu, namun masih masuk kategori kurang efisien karena belum sepenuhnya mengoptimalkan alokasi anggaran dengan maksimal.

Dapat dipahami bahwa pada tahun 2024, terjadi peningkatan signifikan dalam daya serap. Dari pagu sebesar

Rp 6,21 miliar, realisasi hampir mendekati sempurna, yaitu Rp 6,11 miliar, dengan tingkat penyerapan 98,33%. Ini adalah tingkat penyerapan tertinggi dalam periode tiga tahun.

Secara finansial, penghematan hanya sekitar 1,67%, yang menunjukkan upaya maksimal untuk menggunakan seluruh alokasi dana. Penyerapan yang sangat tinggi ini disebabkan adanya kebijakan penggunaan dana sisa nego pengadaan barang/jasa untuk usulan kegiatan pada anggaran perubahan.

Optimalisasi penggunaan anggaran ini dapat mengintervensi capaian *output* yang dihasilkan (misalnya, jumlah layanan yang diselesaikan atau kualitas infrastruktur). Namun demikian penyerapan anggaran ini dapat dipastikan bahwa setiap pengeluaran benar-benar memberikan *value for money* dan *added value* bagi masyarakat.

Selama periode 2022–2024, penggunaan anggaran selalu lebih rendah dari pagu yang ditetapkan. Meskipun ini menunjukkan penghematan, tetapi dalam akuntansi sektor publik justru dapat mengindikasikan perencanaan yang tidak akurat dan lemahnya daya serap anggaran.

4.2.3.2 Analisis Efektivitas

Efektivitas diukur dari sejauh mana target capaian kinerja dapat terealisasi. Seluruh capaian kinerja pada tahun

2022–2024 dapat dikategorikan efektif karena berada di atas 90%.

Berdasarkan data yang tersaji sebelumnya, pada tahun 2022 target capaian kinerja ditetapkan sebesar 100, dengan realisasi capaian sebesar 96,34. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas anggaran mencapai 96,34%, sehingga dapat dikategorikan sangat efektif. Artinya, hampir seluruh target program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik. Capaian ini menggambarkan bahwa pada tahun 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak mampu mengelola anggaran secara efektif, meskipun terdapat sedikit gap antara target dan realisasi. Selisih tersebut dapat diinterpretasikan sebagai konsekuensi dari adanya kendala teknis maupun faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan.

Dengan selisih 3,66% ini mengindikasikan bahwa sebagian kecil dari anggaran yang dialokasikan kemungkinan besar tidak terserap atau mengalami penundaan. Penyebab utamanya diduga berasal dari kendala teknis dan administrasi. Secara spesifik, ketidakefektifan ini disebabkan oleh:

1. Belanja modal atau pengadaan besar, proses pengadaannya seringkali memakan waktu, yang memaksa Perangkat Daerah

mengulang proses agar memperoleh barang/jasa yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan.

2. Faktor-faktor di luar kendali dinas, seperti kenaikan harga material mendadak sebagai dampak diterapkannya kebijakan dari pemerintah pusat, dapat menghambat pelaksanaan pekerjaan dan pembayaran.
3. Upaya mengejar realisasi target kinerja di akhir tahun (Kuartal IV) seringkali menyebabkan penyerapan anggaran tidak merata, yang secara administratif dianggap kurang efisien.

Pada tahun 2023, tingkat efektivitas sedikit mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Target capaian tetap ditetapkan sebesar 100, namun realisasi yang dicapai hanya 92,75. Dengan demikian, tingkat efektivitas anggaran pada tahun tersebut adalah 92,75%, yang masih berada dalam kategori sangat efektif. Penurunan ini dapat menjadi indikasi adanya tantangan lebih besar dalam implementasi program, seperti keterbatasan sumber daya, hambatan birokrasi, dan faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan. Walaupun demikian, capaian di atas 90% tetap menunjukkan bahwa sebagian besar target telah berhasil dipenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak tetap berorientasi pada hasil dan

mampu menjaga kualitas kinerjanya meskipun terdapat penurunan efektivitas.

Dapat dipahami bahwa tahun 2023 menunjukkan tantangan yang lebih signifikan, di mana tingkat efektivitas turun menjadi 92,75%, meskipun masih berada dalam kategori sangat efektif. Peningkatan gap realisasi menjadi 7,25% mengisyaratkan bahwa isu ketidakoptimalan penyerapan anggaran semakin membesar dibandingkan tahun sebelumnya.

Penurunan efektivitas yang disertai gap realisasi yang lebih besar menyoroti adanya hambatan struktural yang lebih dalam dalam manajemen anggaran dan implementasi program:

1. Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, terutama di bidang pengadaan dan pengelolaan keuangan, dapat memperlambat proses administrasi dan pencairan.

Pergantian personil yang tidak disertai dengan kompetensi yang cukup, membutuhkan waktu untuk bisa menjalankan tugas dibidang pengadaan dan pengelolaan keuangan seperti yang diharapkan.

2. Perencanaan kegiatan yang kurang matang di awal tahun atau penentuan standar biaya yang tidak sesuai dengan kondisi riil dapat menyebabkan penyesuaian anggaran yang terlambat, sehingga penyerapan menjadi terhambat. Keterlibatan unsur teknis untuk mengetahui kondisi di

lapangan dapat menentukan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan menentukan jenis kebutuhan barang/jasa yang harus tersedia untuk mengatasi masalah.

3. Penurunan ini bisa menjadi indikasi perlunya peningkatan koordinasi antar bidang dan unit kerja serta pengawasan program dan kegiatan yang lebih ketat, karena semakin besarnya selisih antara target dan realisasi. Peningkatan gap 7,25% ini berpotensi menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang lebih besar dibandingkan tahun 2022.

Selanjutnya, pada tahun 2024 efektivitas anggaran kembali meningkat. Target capaian sebesar 100 dapat direalisasikan dengan capaian 98,33. Tingkat efektivitas ini termasuk kategori sangat efektif, bahkan lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 dan 2023. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam perencanaan maupun pelaksanaan program dan kegiatan. Realisasi kinerja yang lebih tinggi ini mengindikasikan adanya upaya peningkatan kapasitas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak dalam mengoptimalkan anggaran yang tersedia, sehingga sasaran dapat tercapai hampir sempurna. Hal ini juga mencerminkan adanya peningkatan koordinasi, pengendalian, serta monitoring dan evaluasi yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Dapat diketahui bahwa kinerja pada tahun 2024 menunjukkan perbaikan yang luar biasa, dengan efektivitas anggaran melonjak hingga 98,33%, melampaui capaian tahun 2022 dan 2023. Gap realisasi hanya tersisa 1,67%, mengindikasikan bahwa Dinas berhasil mengatasi sebagian besar kendala yang dihadapi di tahun-tahun sebelumnya.

Peningkatan ini mencerminkan adanya upaya serius dan perbaikan sistematis dalam pengelolaan anggaran, mengarah pada peningkatan efisiensi secara simultan:

1. Perbaikan dilakukan melalui perencanaan anggaran yang lebih realistis dan matang, di mana alokasi dana benar-benar mencerminkan kebutuhan operasional dan target kinerja. Dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran telah dilakukan pelibatan seluruh unsur teknis dan telah diukur sesuai dengan pedoman standarisasi harga barang dan jasa, sehingga ketepatan perencanaan menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya.
2. Adanya inisiatif untuk memulai proses pengadaan barang dan jasa lebih awal, sehingga pencapaian target penyerapan anggaran dapat dilaksanakan secara terstruktur sebagaimana yang telah direncanakan.
3. Peningkatan yang signifikan ini menunjukkan adanya sistem pengendalian internal yang lebih efektif. Monitoring dan

evaluasi berkala sebagaimana diamanahkan dalam akuntabilitas pemerintah, memungkinkan identifikasi dan penyelesaian masalah lebih awal sebelum mempengaruhi capaian akhir.

4. Selisih yang sangat kecil (1,67%) kemungkinan besar berasal dari faktor-faktor yang tidak terhindarkan, seperti selisih positif hasil pengadaan barang dan jasa (nilai kontrak lebih rendah dari pagu) dan tidak adanya pembatalan program dan kegiatan.

Seluruh capaian kinerja pada tahun 2022–2024 dapat dikategorikan efektif karena berada di atas 90%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun efisiensi kurang, namun program dan kegiatan tetap mampu menghasilkan output yang sesuai target.



BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan analisis data melalui pembuktian terhadap hipotesis dari permasalahan yang diteliti, dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Kurang efisien menandakan adanya perencanaan anggaran yang belum optimal, serta kemungkinan hambatan dalam pelaksanaan program sehingga daya serap anggaran tidak maksimal. Selama periode 2022–2024, penggunaan anggaran selalu lebih rendah dari pagu yang ditetapkan. Meskipun ini menunjukkan penghematan, tetapi dalam akuntansi sektor publik justru dapat mengindikasikan perencanaan yang tidak akurat dan lemahnya daya serap anggaran.
2. Efektivitas tinggi (efektif) menunjukkan bahwa kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak tetap tercapai sesuai target, meskipun realisasi anggaran tidak terserap penuh.

5.2 Implikasi

Secara keseluruhan, implikasi utama adalah menyediakan instrumen diagnostik yang valid dan praktis bagi pemerintah daerah untuk menilai, memperbaiki, dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran belanja dinas yang bertanggung jawab atas pelayanan publik, khususnya di bidang perpustakaan dan kearsipan.

Dari sisi perencanaan, temuan penelitian menunjukkan bahwa peningkatan efisiensi dan efektivitas anggaran sangat bergantung pada kualitas proses perencanaan yang dilakukan sejak awal. Perencanaan yang berbasis kinerja dan kebutuhan riil organisasi akan mampu meminimalkan pemborosan anggaran serta memastikan alokasi sumber daya sesuai dengan prioritas strategis. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem perencanaan yang terintegrasi antara perumusan program, penetapan indikator kinerja, dan penentuan besaran anggaran yang dibutuhkan. Proses perencanaan juga perlu lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan dan berbasis pada hasil evaluasi pelaksanaan anggaran periode sebelumnya.

Sementara itu, dari sisi sumber daya manusia, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran tidak akan tercapai tanpa dukungan aparatur yang kompeten, berintegritas, dan memiliki kemampuan analisis anggaran yang baik. Implikasi ini menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis perencanaan dan penganggaran, dan penguatan budaya kinerja. Selain itu, perlu dilakukan pembagian tugas yang proporsional agar setiap pegawai memiliki peran yang jelas dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa keterbatasan sebagai berikut :

1. Penelitian ini menggunakan indikator rasio sederhana dalam menilai efisiensi dan efektivitas, yaitu perbandingan antara pagu dengan realisasi

anggaran serta perbandingan antara target dengan realisasi capaian kinerja. Pendekatan ini memang sesuai dengan standar analisis di bidang akuntansi sektor publik, namun belum sepenuhnya menggambarkan kompleksitas proses penganggaran, termasuk kualitas output dan outcome yang dihasilkan.

2. Ruang lingkup penelitian terbatas pada periode tiga tahun anggaran, sehingga hasil analisis hanya memberikan gambaran kondisi efisiensi dan efektivitas dalam kurun waktu yang relatif singkat. Keterbatasan ini menyebabkan penelitian belum dapat menjelaskan secara komprehensif tren jangka panjang dan pola perubahan kinerja pengelolaan anggaran.

5.4 Agenda Penelitian yang akan datang

Keterbatasan penelitian yang dilakukan saat ini mengharuskan penelitian selanjutnya perlu dilakukan peningkatan pelaksanaannya agar hasilnya menjadi lebih baik, maka untuk penelitian berikutnya perlu :

1. Menambah kurun waktu penelitian dengan mengambil masa periode waktu yang lebih panjang sehingga dapat menggambarkan tren jangka panjang dan pola perubahan efisiensi serta efektivitas anggaran secara lebih komprehensif .
2. Selain analisis kuantitatif melalui data anggaran, penelitian berikutnya dapat mengombinasikan pendekatan kualitatif, seperti wawancara atau focus group discussion dengan pejabat pengelola anggaran. Hal ini bertujuan untuk menggali faktor penyebab rendah atau tingginya efisiensi dan efektivitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambar Wati, D. A., Setyorini, I., & Fitriani, A. (2023). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal Tahun 2018–2022. *Jurnal Ilmu Administrasi Mulawarman (JIAM)*, 13(1), 88–96.
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2009)?
- Halim, Abdul, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi 4, (Jakarta: Salemba Empat, 2017).
- Bastian, Indra, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Erlangga, 2006).
- Mahsun, Mohamad, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2016).
- Lira Pappa, Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar, Tesis (Universitas Bosowa, 2022).
- Sumange, Ariel, “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) Minahasa Selatan,” *Jurnal EMBA*, Vol. 1, No. 3, (2013).
- Amelinda, A., Situmorang, M., Octavianty, E., & Nasution, Y. N. (2022). Analisis efektivitas dan efisiensi penyerapan anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok (2015–2019). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi (JIAFE)*, 8(2), 159–171. Universitas Pakuan.
- Halim, A. (2016). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

- Indriati, B., & Supardal. (2023). Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan berbasis SIMARDA di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman. *Jurnal Inovasi Reformasi Pemerintahan Daerah (JIRReG)*, 5(2), 77–89.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Marniati, M., & Toding, S. (2023). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tana Toraja. *Jurnal Economic Excellence Ibnu Sina*, 5(2), 55–66.
- Ramadhani, G., dkk. (2023). “Evaluasi Penganggaran PAD dan Efektivitas–Efisiensi Belanja pada Pemda Kota Bogor 2016–2020.” *JIAFE – Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi*. (PAD & efisiensi/efektivitas belanja).
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.